

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, hlm. 294.
- Ariyanto, A. Patunru. 2015. Hilirisasi. Kompas 24 Januari 2015
- Baharuddin Riqiey and Pandu Satriawan Zainulla, "Problematisasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Tambang," *SOSIALITA* 1, no. 1 (2022).
- Bagir Manan (I), Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 56-57
- Daryanto. 2017. Pengetahuan dasar bahan teknik. Bandung: Alfabeta
- Fajar Sugianto, 2013. *Economic Analysis of Law*: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar, Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Hanif, I. D. (2019). Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) Terhadap Indonesia Terkait dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia. JOM FISIP.
- Hyronimus Rheti, 2015. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya; Yogyakarta.
- Moh. Hasan Wargakusumah, 2000. Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Raja

- Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ishaq, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ishaq H, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta,
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
- Jimly Asshidiqie, 2017. *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo. Depok. Hlm 14.
- _____ dan M. Ali Safa'at; 2006; *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*; Konpress; Jakarta.
- Karina Novita Sari Setiawan Dkk. 2018. Analisis Skala Penambangan Mineral dan Pengangkutan (Studi Kasus : Angkutan Nikel di Sulawesi Tenggara). Departemen Teknik Transportasi Laut, Fakultas Teknologi Kelautan. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). *Jurnal Teknik ITS* Vol. 7, No. 1 (2018), 2337-3539 (2301-9271 Print).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). *Booklet Tambang Nikel* 2020. diakses pada

<https://www.esdm.go.id/id/booklet/booklet-tambang-nikel-2020> 8

Maret 2025 Pukul 12:00 Wita.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,

"Laporan Kinerja Sumber Daya Alam," 2023

Lampiran Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,

Nomor: KEP. 01. B Tahun 2004 tentang Program Legislasi Arsip

Nasional Republik Indonesia.

Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama

Media, Yogyakarta, 1999,

Media Nikel Indonesia, Sejarah Perkembangan Nikel Di Indonesia diakses

di laman [Http://nikel.co.id](http://nikel.co.id) Pada tanggal 1 Februari 2025.

Moh. Hasan Wargakusumah, 2000. Perumusan Harmonisasi Hukum

tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, Badan Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

M. Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat

Hukum, Ctk. Kedua, Kencana; Jakarta.

Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017. Hukum dalam Pendekatan

Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

Novianto M. Hantoro, et., al., Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan

mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, P3DI Setjen DPR

- Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2012.
- Notosiswoyo, S., & Anggayana, K. 2018. Pertambangan dan pengelolaan sumber daya mineral. Gadjah Mada University Press.: Yogyakarta.
- Nico Schrijver, *Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
- Oki Hermansyah Dkk. 2022. "Penguatan Struktur Ekonomi Indonesia: Tinjauan Local Value Chain, Hilirisasi, dan Industri Hijau». Bank Indonesia Institute: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta.
- Romi Librayanto, Sistem Norma Hukum dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal: Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan di Indonesia, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-norma dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, (New York: Aspen Publishers, 2007).
- Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel),

- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, 2014. Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, Masalah penegakan hukum; Suatu tinjauan sosiologis. Badan pembinaan hukum nasional: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Sukandarrumidi. 2015. Geologi mineral logam . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ten Berge dan De Waard dalam L. M. Lopian Gandhi, Harmonisasi Hukum menuju Hukum Responsif, Makalah Seminar, disampaikan pada pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 1995.
- U.S Geological Survey, "Mineral Commodity Summaries: U. S. Geological Survey" (2021), <https://doi.org/10.3133/mcs2021>.
- Ukar Wijaya Soelistijo.(2013).Prospect of Potential Nickel Added Value Development in Indonesia. Earth Science. Vol. 2, No. 6, 2013
- Yuli Indrawati. *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, bandung;Mujahid press. 2014.
- Wicipto Setiadi (I), Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4, Nomor 2, Direktorat Jendral

Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI,
Jakarta, Juni 2007.

Tesis :

Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, Aspek hukum pengaturan hak guna
usaha Pasca berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, Tesis,
Fakultas hukum; Universitas Hasanuddin.

Jurnal :

Anisa Dwi Syafira dkk. Jurnal Economina. Volume 2, Nomor 1, Januari
2023. Analisis Peluang, Tantangan, dan Dampak Larangan Ekspor
Nikel Terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni
Eropa di WTO. Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN
dan RRT, Politeknik APP Jakarta.

Chrissostomus Sitohang Dkk. *Hilirisasi Komoditi Mineral: Studi Kasus
Nikel di Indonesia*. Kampus Akademik Publishing; Jurnal
Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Vol. 3 No. 2. Politeknik APP
Jakarta. 2025. Jakarta

David Doresta Wijaya^{1*} , Nurul Mubin. 2024. Teori Kedaulatan Negara.
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Volume. 2 No. 4
November 2024 e-ISSN: 3032-2413; dan p-ISSN :3032-5293, Hal.
114-121 DOI: <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>

Endrianto Bayu Setaiwan Dkk. Jurnal Rechsvinding Volume 14. No. 1;
*“Prinsip konstitusi Ekonomi Dalam Hilirisasi Nikel untuk
mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”*.

Fakultas Hukum, Univesritas Brawijaya

Fitriah Faisal, Amir Faisal, and Endah Widyastuti, "Pengaruh Metode Economic Analysis of Law dalam Perkembangan Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 1 (2022): 82–92, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>

Muhammad Agung & Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. 2022. Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e ISSN : 2656 6753, p_ISSN: 2598-9944 DOI 10.36312/jisip.v6il.3085/<http://ejournal.Mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

Muhamad Nafi Uz Zaman. *"Implementasii economic of law dalam pengaturan hilirisasi di Indonesia: antara permanent sovereignty over natural resources dan perdagangan internasional"*. Jurnal Rechstvinding Volume 14 No. 1. Fakultas Hukum universitas Diponegoro. 2025. Semarang.

Puariesthaufani N, A., P Hadi Wibowo, R., & Anam, C. (2022). Quo Vadis Renewable Electricity In Southeast Asia: Policy Overview Of The Energy Transition Towards Zero Emissions. Journal of Comprehensive Science (JCS), 1(2), 236–248. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i2.42>

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-norma dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan

Hakim, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Elias, M. (2002). Nickel laterite deposits –geological overview , resources and exploitation. Centre for Ore Deposit Research, University of Tasmania, CODES Special Publication 4, 205–220.

Peraturan Perundang-undangan :

1. UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1,2,3 dan 4
2. UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perindustrian
4. UU No. 1 tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara
5. Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
7. UU No. 16 Tentang Pengesahan Paris Agreement to The Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
8. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan PP No. 23 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan baubara (Minerba).

10. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.

11. Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 Tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2019.